



Kerangka TheoLegis Berbasis Tafsir Surah Al-Buruj Pada Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara

Abdul Madjid Podungge, Devika Rahayu Daud & Irfan Gani

Fakultas Hukum Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: abdulmadjidpodungge@unugo.ac.id, devikarahayudaud@unugo.ac.id, & irfangani@unugo.ac.id

Abstract

The enforcement of substantive justice in Indonesia's administrative dispute resolution is hindered by "legal tunnel vision" stemming from rigid textual legal formalism. This research aims to reconstruct adaptive qualifications for administrative actions by developing the TheoLegis framework. Utilizing a normative juridical method with legislative, conceptual, comparative, and historical approaches, the study explores the radical deconstruction of procedural rigidity. The findings reveal that integrating contemporary Western hybrid proof models with the transcendental spiritual dimensions of Surah Al-Buruj from the Tafsir Al-Jawahir results in the TheoLegis model. This framework purifies evidence materially beyond the formal validity of documents through the concept of "legal shifts," compelling public officials to fulfill administrative duties objectively based on macrocosmic factual alignment. TheoLegis effectively dismantles the absolute dominance of the presumption of validity (praesumptio iustae causa) and fosters judicial moral courage to perform legal corrections during trials. As an original contribution, this research offers a blueprint for reforming national administrative procedural law that is transparent, accountable, and morally sound, embodying the adage fiat justitia ruat caelum. This innovation provides humanistic and transformative legal protection for citizens' constitutional rights.

Keywords: Judicial Evidence; Surah Al-Buruj; TheoLegis.

Abstrak

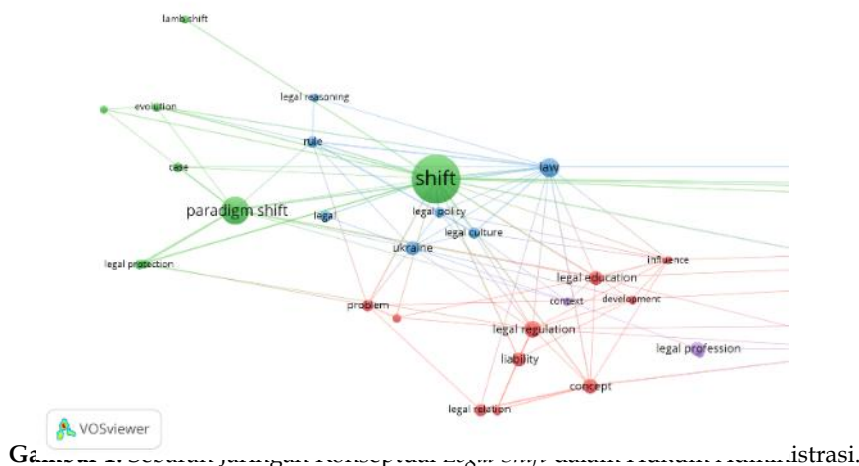
Penegakan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia terhambat oleh patologi legal tunnel vision akibat formalisme hukum positif yang kaku. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kualifikasi perbuatan administratif yang adaptif melalui pengembangan kerangka kerja TheoLegis. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan historis, penelitian ini mengeksplorasi dekonstruksi rigiditas prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi model pembuktian hibrida kontemporer dengan dimensi spiritual transendental Surah Al-Buruj dalam Tafsir Al-Jawahir melahirkan model TheoLegis. Kerangka ini mampu memurnikan alat bukti secara material melampaui keabsahan formal dokumen melalui konsep legal shifts, yang memaksa pejabat publik memenuhi kewajiban administratif secara objektif berdasarkan keselarasan fakta makro-kosmos. TheoLegis meruntuhkan dominasi absolut asas praduga keabsahan (praesumptio iustae causa) dan mendorong keberanian moral hakim untuk melakukan koreksi yuridis di persidangan. Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan cetak biru pembaruan hukum acara peradilan tata usaha negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas moral tinggi demi mengejawantahkan adagium fiat justitia ruat caelum. Inovasi ini memberikan perlindungan hukum yang humanis dan transformatif bagi hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Pembuktian Peradilan; Surah Al-Buruj; TheoLegis.

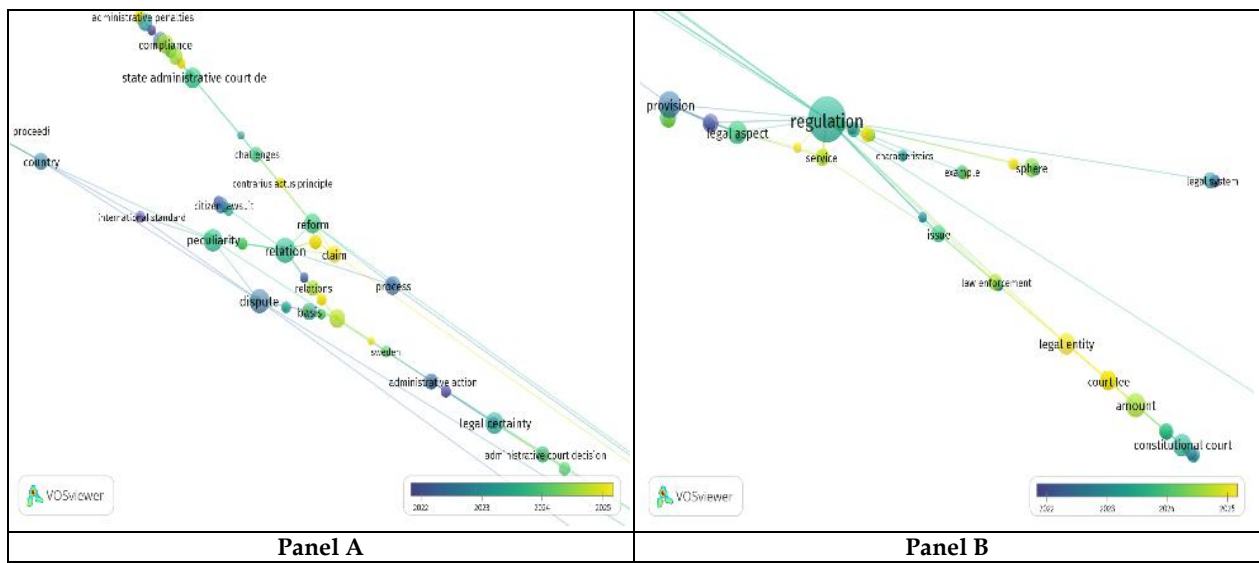
A. PENDAHULUAN

Patologi prosedural berupa *legal tunnel vision* dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia berakar dari kecenderungan birokrasi yang memaku kualifikasi yuridis tindakan pemerintahan secara kaku pada formalitas teks peraturan perundang-undangan semata. Aparatur negara terperangkap dalam nalar linier yang sempit, sebuah cara pandang kognitif yang mengasingkan pertimbangan hukum dari pergolakan fakta material yang senyatanya berkembang di lapangan, sehingga memicu penafian sistemik terhadap ragam bukti objektif sodoran warga negara yang muncul pasca-penerbitan keputusan tata usaha negara. Proses administrasi internal pun lambat laun menjelma menjadi ruang tertutup yang kedap dialektika prosedural murni, memproduksi keputusan sepihak yang mencederai hak defensif masyarakat, serta melimpahkan beban koreksi secara masif ke ranah sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Di tengah sikap defensif pejabat yang berlindung di balik asas praduga keabsahan secara mutlak, hukum acara peradilan tata usaha negara mendesak adanya rekonstruksi radikal pada paradigma pembuktian yang adaptif guna memicu pergeseran perspektif hukum (*legal shifts*) secara jujur demi menyelamatkan hak-hak konstitusional warga negara dan menghadirkan takaran keadilan substantif yang sejati.

Pijakan empiris penelitian ini bergerak dari pemetaan konseptual basis data artikel ilmiah terindeks *Crossref* lewat piranti Publish or Perish menggunakan kata kunci *legal shift* dan *administrative law*, yang membuktikan bahwa diskursus akademik global masih terkurung dalam pusaran tema *judicial review* dan *discretion klasik*, sehingga mengabaikan fleksibilitas pembuktian hibrida di rahim hukum acara. Patologi cara pandang hukum birokrasi ini terkonfirmasi secara empiris melalui klasterisasi aplikasi VOSviewer pada Gambar 1 dan Gambar 2 (Panel a dan Panel b), di mana keterikatan erat antara *legal tunnel vision*, *administrative court*, *evidence evaluation*, dan *abuse of discretion* menegaskan kegagalan kognitif aparatur dalam menilai fakta sengketa. Keterisolasian kognitif tersebut berhulu pada hegemoni positivisme hukum tekstual (*regulation* dan *government*) yang mendominasi konstelasi pemikiran birokrasi demi menegakkan kepatuhan formal semata, sebuah potret yang mengonfirmasi absennya rujukan meta-narasi keadilan transendental maupun pemanfaatan pendekatan manuskrip klasik sebagai instrumen korektif birokrasi nasional.



Sumber: Visualisasi melalui VOSviewer menggunakan data yang diekstraksi dari artikel-artikel penelitian yang terindeks dalam basis data Crossref.



Gambar 2. Hasil Pemetaan Doktrin Hukum Terhadap Patologi Kognitif Birokrasi dan Positivisme Regulasi (Panel a: Jaringan Legal Tunnel Vision; Panel b: Sebaran Istilah Regulation).

Sumber: Visualisasi melalui VOSviewer menggunakan data yang diekstraksi dari artikel-artikel penelitian yang terindeks dalam basis data Crossref.

Penajaman celah penelitian tersebut memperoleh penguatan doktrinal dari model pembuktian hibrida Barat yang memadukan struktur narasi (*legal stories*) dan argumentasi yuridis (*legal arguments*) untuk menyerap *legal shifts* secara akomodatif di sepanjang persidangan ¹, mempertemukan kedalaman teks undang-undang dengan kronologi riil peristiwa di lapangan ², serta membatasi diskresi sewenang-wenang pejabat akibat kegagalan birokrasi konvensional dalam merespons kompleksitas dunia ³. Keterbatasan kajian sekuler Barat dalam memutus belunggu *legal tunnel vision* tersebut didekonstruksi secara mendasar melalui internalisasi dimensi spiritual Surah Al-Buruj yang digali dari karya monumental *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* ⁴. Pemikiran teologis ini menegaskan bahwa kezaliman administratif berupa pemaksaan kualifikasi sepihak oleh penguasa tiran merupakan anomali hukum publik yang secara mutlak berbenturan dengan Hukum Keteraturan Alam (*Sunnatullah*), sehingga menyuntikkan etika keadilan transendental tingkat tinggi ke dalam skema pembuktian hibrida nasional agar keputusan tata usaha negara dipaksa tunduk pada kejujuran fakta objektif makrokosmos.

Orisinalitas gagasan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja "*TheoLegis*" sebagai jembatan epistemologis baru yang mengonvergensi instrumen hukum publik

¹ Floris Bex and Bart Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof," *Artificial Intelligence and Law* 21, no. 3 (2013): 253–78, <https://doi.org/10.1007/s10506-012-9137-4>.

² Andreas Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative," *German Law Journal* 50 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S2071832200021970>.

³ Luc Brès, Emmanuel Raufflet, and Johnny Boghossian, "Pluralism in Organizations: Learning from Unconventional Forms of Organizations," *International Journal of Management Reviews* 20, no. 2 (2018): 364–86, <https://doi.org/10.1111/ijmr.12136>.

⁴ Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (الجواهر في تفسير القرآن الكريم), 25th ed. (Cairo, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1926).

kontemporer dengan dimensi narasi teologis transendental Surah Al-Buruj dari tafsir klasik karya Syekh Thanthawi Jauhari untuk memutus patologi *legal tunnel vision* birokrasi demi mengejawantahkan adagium hukum *fiat justitia ruat caelum*. Penelitian ini bertujuan memformulasikan arah transformasi kualifikasi perbuatan administratif yang adaptif melalui operasionalisasi kerangka *TheoLegis* guna menyediakan panduan metodologis baru bagi hukum acara peradilan administrasi negara agar mampu melampaui jebakan formalisme hukum positif tekstual birokrasi, demi menjawab dua rumusan masalah: 1) Bagaimana anatomi *legal tunnel vision* dalam kualifikasi perbuatan administratif dapat didekonstruksi secara radikal melalui formalisasi konsep *legal shifts* pada sistem hukum acara peradilan tata usaha negara nasional?; dan 2) Bagaimana formulasi kerangka kerja *TheoLegis* berbasis meta-narasi transendental Surah Al-Buruj mampu mengejawantahkan adagium *fiat justitia ruat caelum* dalam rekonstruksi tanggung jawab administratif pejabat tata usaha negara?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif⁵ ini memfokuskan pusat kajiannya pada pengembangan doktrin, norma, dan asas di ranah hukum administrasi negara prosedural melalui kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan historis (*historical approach*)⁶. Pendekatan perundang-undangan diterapkan secara kritis untuk menelaah kekakuan mekanis implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta hukum acara peradilan tata usaha negara, sedangkan pendekatan konseptual dan perbandingan digunakan guna membedah kelenturan model pembuktian hibrida barat serta struktur narasi hukum publik kontemporer. Adapun pendekatan historis diaplikasikan secara spesifik untuk menggali dimensi spiritual transendental Surah Al-Buruj dari manuskrip klasik Islam guna merekonstruksi tanggung jawab administratif pejabat publik nasional. Bersandar pada pilar rujukan bahan hukum primer regulasi positif sengketa peradilan dan bahan hukum sekunder hasil penelusuran *Publish or Perish* dan divisualisasikan melalui Vosviewer serta kitab *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, teknik pengumpulan dijalankan melalui studi dokumen sistematis untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif-normatif berbasis penalaran hukum (*legal reasoning*) deduktif. Analisis doktrinal tersebut mempertemukan teks abstrak peraturan dengan skema cerita objektif warga negara secara hibrida demi memfasilitasi terjadinya *legal shifts* di persidangan. Melalui kritik ketat pada teks tafsir klasik dan analisis komparatif, sintesis hukum ini mengonvergensi nilai teologis serta kelenturan prosedur modern untuk menghasilkan formulasi kualifikasi perbuatan administratif yang adaptif terhadap dinamika pembuktian sengketa di lapangan⁷. Desain metodologis yang tertata ketat ini secara mutlak bertindak sebagai instrumen pengujian yudisial yang sah guna

⁵ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.22219/acj.v4i1.24855>.

⁶ George Mousourakis, "Conceptualizing Legal Change: A Comparative Law Approach," *Acta Juridica Hungarica* 48, no. 3 (2007): 259-80, <https://doi.org/10.1556/AJur.47.2007.3.3>.

⁷ A K M Bahalul Haque, A K M Najmul Islam, and Patrick Mikalef, "Explainable Artificial Intelligence (XAI) from a User Perspective: A Synthesis of Prior Literature and Problematising Avenues for Future Research," *Technological Forecasting and Social Change* 186 (2022): 122120, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122120>.

melampaui jebakan formalisme prosedural demi menegakkan marwah kebenaran materiil dan keadilan substantif secara nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anatomi *Legal Tunnel Vision* dalam Kualifikasi Perbuatan Administratif di Indonesia

Patologi prosedural *legal tunnel vision* hukum administrasi Indonesia berakar dari rigiditas birokrasi yang mengunci kualifikasi yuridis pada teks peraturan dan mengabaikan fakta material lapangan⁸. Pendekatan dogmatis ini mengasingkan tindakan penguasa dari realitas sosiologis, mengorbankan kebenaran materiil demi kepastian semu⁹, serta diperparah defisit partisipasi publik substantif¹⁰. Hambatan regulasi *top-down* dan penyalahgunaan wewenang kronis akhirnya memicu perluasan sengketa pengganggu ekonomi nasional¹¹, sehingga transparansi kontrol independen menjadi prasyarat mutlak pengikis diskresi sewenang-wenang. Sektor pengadaan barang dan jasa menjadi bukti nyata patologi ini, di mana keabsahan dokumen lelang terikat kaku pada profil birokrat ketimbang fleksibilitas prosedur pembuktian. Pembatasan sepihak narasi fakta hukum memicu keputusan yang cacat keadilan substantif¹², akibat penolakan birokrasi terhadap konsep *legal shifts* dalam menyandingkan bukti susulan warga negara¹³. Watak linier tersebut mereduksi hukum sebatas legitimasi kekuasaan penguasa, kontras dengan tuntutan global yang menghendaki integrasi cerita hukum secara hibrida. Maka, digitalisasi dan kecerdasan buatan wajib difungsikan untuk memperkuat pertimbangan substantif adaptif. Integrasi ini menuntut konfigurasi ulang kerja, mitigasi risiko etika, privasi data, serta standarisasi kriteria epistemik sistem cerdas demi mengoptimalkan perlindungan hukum publik, yang jika gagal dimitigasi akan memindahkan beban koreksi kualifikasi hukum secara masif ke peradilan¹⁴.

⁸ Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, "AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS," *JURNAL SULTAN Riset Hukum Tata Negara*, 2024, 52–63, https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569.

⁹ Ahmad Fathan Aniq, Yos Johan Utama, and Nabitatus Sa'adah, "Penguatan Perlindungan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Rekonstruksi Banding Administrasi," *Integralistik* 37, no. 1 (2026): 117–29, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.35371>; Timbo Mangaranap Sirait, Khalimi --, and Ignatius Bambang Sukarno Hatta, "ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN.JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 83–89, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1625>.

¹⁰ Fritz Hotman Syahmahita Damanik et al., "Community Participation in the Public Decision Process: Realizing Better Governance in Public Administration," *Global International Journal of Innovative Research* 1, no. 2 (2023): 88–96, <https://doi.org/10.59613/global.v1i2.12>; Elaine Stewart and Ciarán Connolly, "The Govern(Mentality) of Financial Reporting Reform: Lessons from UK Central Government," *Public Management Review*, 2024, 1–22, <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2387816>.

¹¹ Irsan Hardi et al., "Decrypting the Relationship Between Corruption and Human Development: Evidence from Indonesia," *Ekonomikalia Journal of Economics* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.60084/eje.v1i1.22>.

¹² Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative."

¹³ Bex and Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof."

¹⁴ Amalia Sidqia and Muhammad Iksan, "PTUN Dan PT TUN: Kompetensi Pengadilan Dan Relevansinya Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 11, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3345>.

Ketidakmampuan administrasi internal mengadopsi pembuktian adaptif memaksa institusi peradilan bekerja keras membongkar regulasi kedinasan yang menutup mata dari kebenaran objektif sengketa. Ketika perkara bergulir di persidangan, hukum acara tidak boleh lagi dijadikan tameng formalitas pembatas penilaian hakim dari fakta material senyatanya di lapangan. Sebab, formalisme hukum yang mengisolasi diri dari kebenaran materiil pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap marwah luhur keadilan substantif. Penjelasan Anatomi *Legal Tunnel Vision* dalam Kualifikasi Perbuatan Administratif di Indonesia merujuk pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Sintesis Fenomena *Legal Tunnel Vision* dan Defisit Perlindungan Hukum Administrasi

Aspek Analisis	Deskripsi Gejala/Karakteristik	Dampak Terhadap Perlindungan Hukum
Akar Penyebab	Kecenderungan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengunci kualifikasi yuridis secara kaku sejak awal proses penerbitan keputusan.	Mengisolasi tindakan hukum penguasa dari realitas sosiologis dan kebutuhan perlindungan hukum warga negara yang mendesak.
Perilaku Pejabat (Dogmatisme)	Pejabat memaku pandangan secara mutlak pada teks formalitas peraturan perundang-undangan (formalisme buta).	Mengorbankan kebenaran materiil demi mencapai kepastian prosedural yang semu.
Pengabaian Fakta Material	Ketiadaan kemauan untuk menyandingkan data awal pemerintah dengan perkembangan fakta riil atau bukti susulan dari warga negara.	Gagal menangkap esensi keadilan substantif karena mengabaikan fleksibilitas prosedur dan konsep legal shifts.
Eksklusivitas Birokrasi	Defisit partisipasi publik substantif dan pemaksaan struktur birokrasi yang bersifat top-down.	Membatasi kapasitas aparatur dalam menyerap aspirasi vital dan memicu sengketa administrasi yang meluas.
Seleksi Fakta Sepihak	Aparatur membatasi konstruksi peristiwa hanya pada dokumen formal yang menguntungkan posisi kedinasan (efek eksklusif).	Menghambat masuknya kebenaran materiil dan mengakibatkan putusan tata usaha negara yang cacat keadilan substantif.

Sumber: Diolah dari Rumbawer et al. (2024); Aniq et al. (2026); Sirait et al. (2025); Stewart & Connolly (2024); Bex & Verheij (2010); Damanik et al. (2023); dan Hardi et al. (2023).

a. Formalisasi *Legal Shifts* dalam Model Pembuktian Hibrida pada Sengketa Tata Usaha Negara

Formalisasi konsep *legal shifts* melalui model pembuktian hibrida yang mengawinkan struktur cerita (*stories*) dan argumentasi yuridis (*arguments*) sangat mendesak dilakukan untuk merombak kekakuan hukum acara tata usaha negara¹⁵. Pendekatan progresif ini memberikan ruang prosedural bagi hakim untuk merekonstruksi kronologi peristiwa berdasarkan validitas alat bukti baru demi menegakkan keadilan substantif¹⁶. Akurasi kualifikasi sepihak birokrasi diuji secara

¹⁵ Bex and Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof."

¹⁶ Ismaya Rahailia Nasution and Sidi Ahyar Wiraguna, "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan Atas Doktrin Dan Yurisprudensi," *Politika Progresif Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2597>; Tutut Hartati and Edi Saputra Hasibuan, "Nilai

dinamis lewat pendayagunaan sistem kecerdasan buatan penampil narasi alternatif¹⁷. Penyelarasan klausa prosedur dan praktik teknis ini membangun manajemen risiko pembuktian *end-to-end* serta audit independen sistem otomatisasi. Logika probabilitas dan koherensi dalam penyandingan cerita warga negara versus argumen tertulis penguasa melahirkan standar pengujian objektif yang meruntuhkan dominasi absolut asas hukum *praesumptio iustae causa*¹⁸. Implikasi metodologis ini seketika mendobrak dinding tebal legal tunnel vision pejabat dan memaksa peralihan paradigma menuju keabsahan materiil yang akomodatif terhadap hak konstitusional masyarakat¹⁹.

Pelembagaan *legal shifts* merupakan imperatif yuridis untuk memulihkan hakikat peradilan administrasi sebagai benteng perlindungan masyarakat sengketa. Ketika kebenaran materiil mendesak adanya reposisi kualifikasi tindakan penguasa, hukum acara wajib mencair dan menolak berlindung di balik tameng formalisme undang-undang yang usang. Transparansi pembuktian harus dijalankan tegak lurus dengan realitas faktual guna meruntuhkan ego sektoral birokrasi pemerintahan yang opresif. Sebab, hukum acara peradilan administrasi yang mengisolasi diri dari kejujuran fakta lapangan pada hakikatnya hanyalah instrumen tirani prosedural yang mengkhianati marwah luhur keadilan substantif.

b. Struktur Narasi Hukum Publik Andreas von Arnould dan Batasan Fakta Prosedural

Struktur narasi hukum publik krusial memediasi kenyataan faktual (*das Sein*) dan keharusan normatif (*das Sollen*) melalui pembentukan makna peristiwa konkret²⁰. Aplikasi norma bersandar pada perbandingan teks abstrak dengan kronologi riil lapangan²¹ penentu keabsahan kualifikasi administratif. Re-kontekstualisasi ini mentransformasi peristiwa harian menjadi teks fungsional penarik legitimasi, sehingga hakim wajib menguji koherensi naratif keputusan. Perbedaan antara narasi besar konstitusi (*grands récits*) dan narasi kecil teknis (*petits récits*) memicu ketimpangan saat pejabat menolak bukti baru warga negara²². Realitas ini menuntut peninjauan yudisial mendalam untuk mendekonstruksi bias birokrasi pembela

Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian Dalam KUHAP Nasional," *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora* 12, no. 1 (2026): 75–85, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4925>.

¹⁷ Luca Longo et al., "Explainable Artificial Intelligence (XAI) 2.0: A Manifesto of Open Challenges and Interdisciplinary Research Directions," *Information Fusion* 106 (2024): 102301, <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102301>.

¹⁸ Bex and Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof."

¹⁹ Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative"; Cantika Reika Viana, "KEDUDUKAN DAN PENGARUH ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DI NEGARA INDONESIA," *ADIL Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2026): 317–39, <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5734>.

²⁰ Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative."

²¹ Bitu Gadsia Spaltani, "Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan," *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 55–78, <https://doi.org/10.55292/dt3r3350>.

²² Aldi Ardiansyah, Muhammad Gary Gagarin Akbar, and Muhamad Abas, "Evidentiary Strength of Land Ownership Certificates: An Analysis of Judicial Considerations in Supreme Court Decision Number 3762 K/Pdt/2022," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 471–87, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.463>.

stabilitas semu lewat eksplorasi peroratif sistem pendukung keputusan penampil argumen dialektis kontradiktif ²³.

Transparansi kecerdasan buatan *e-governance* wajib dijamin demi mengikis patologi *legal tunnel vision* akibat seleksi fakta sepihak birokrasi ²⁴, karena melokalisir pembuktian pada dokumen kedinasan terbukti meruntuhkan sifat adaptif hukum prosedur kontemporer. Penataan hukum acara peradilan tata usaha negara nasional harus diarahkan untuk membongkar hegemoni narasi tunggal birokrasi dengan meruntuhkan sekat eksklusif fakta sengketa yang dikunci demi ego kedinasan. Penemuan hukum wajib dikembalikan pada keterpaduan dialektis yang jujur antara teks abstrak undang-undang dan kronologi riil peristiwa di lapangan. Sebab, menutup mata dari fakta hukum material demi mempertahankan kepastian formal regulasi pada hakikatnya adalah penindasan prosedural nista yang mencederai nilai luhur keadilan substantif.

Tabel 2. Kerangka Koherensi Naratif sebagai Instrumen Deliberatif dalam Pengujian Keabsahan Tindakan Pemerintahan

Konsep Narasi/Fakta	Definisi dan Karakteristik	Peran Pejabat Administrasi/Hakim	Implikasi terhadap Keabsahan Prosedural
Narasi Besar (grands récits) vs Narasi Kecil (petits récits)	Narasi besar mengawal nilai fundamental keadilan substantif konstitusi, sedangkan narasi kecil dalam peraturan teknis sering menyempitkan pembuktian demi efisiensi dan kepastian formal.	Pejabat cenderung berlandung di balik narasi kecil untuk menolak bukti baru; hakim berperan menggunakan narasi besar untuk menjiwai setiap tindakan aparatur.	Benturan kedua narasi memicu pengucilan fakta hukum krusial dan menciptakan ketimpangan prosedural yang melanggar esensi perlindungan hukum.
Metode Perbandingan Teks Abstrak dan Kronologi Riil	Proses aplikasi norma yang mempertemukan teks undang-undang yang abstrak dengan jalinan cerita peristiwa konkrit di lapangan.	Pejabat menggunakan narasi formal untuk membingkai fakta agar selaras dengan maksud preskriptif undang-undang.	Menentukan sah atau tidaknya kualifikasi administratif melalui jalinan makna antara teks normatif dan dinamika sosial.
Eksklusif Fakta dan Legal Tunnel Vision	Seleksi fakta secara sepihak di mana konstruksi peristiwa hanya dibatasi pada dokumen formal yang menguntungkan posisi kedinasan.	Pejabat melokalisir pembuktian; Hakim dituntut meruntuhkan batasan narasi sepihak melalui pemurnian alat bukti di persidangan.	Mengakibatkan hilangnya sifat adaptif hukum prosedur, menghambat kebenaran materiil, dan menghasilkan putusan yang cacat keadilan substantif.
Koherensi Naratif sebagai Instrumen Deliberatif	Mekanisme untuk membedah validitas klaim faktual melalui argumen yang kontradiktif dan beragam (dialektika).	Hakim melakukan pengawasan ketat terhadap koherensi narasi untuk mencegah manipulasi kronologi dan penyalahgunaan diskresi.	Menjadi syarat mutlak pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan sintesis pemikiran von Arnould (2017) dan State of the Art (SOTA) hukum administrasi yang meliputi Ardiansyah et al. (2025), Spaltani (2024), Husyam et al. (2026), serta Longo et al. (2024)

²³ Longo et al., "Explainable Artificial Intelligence (XAI) 2.0: A Manifesto of Open Challenges and Interdisciplinary Research Directions."

²⁴ Husyam, Lies Nur Intan, and Rita Junita, "Rasionalitas Weberian Dalam Pemerintahan Modern: Tantangan Birokrasi Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 6 (2026): 4050–62, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1744>.

2. Transformasi *Legal Shifts* Berbasis Keteguhan Imaterial Surah Al-Buruj dalam Dekonstruksi Prosedur Administrasi Negara

Dekonstruksi radikal prosedur administrasi melalui *legal shifts* wajib melampaui dogmatisme teks demi keadilan materiil sengketa publik ²⁵. Pergeseran yuridis ini menemukan jangkar transendental pada keteguhan imaterial Surah Al-Buruj penolak kualifikasi sepihak penguasa tiran ²⁶. Konvergensi spiritual dan kelenturan modern memaksa akuntabilitas berevolusi melalui otonomi etik birokrat dan evaluasi kritis keputusan otomatis. Standar moral ini diintegrasikan lewat audit teknis, tata kelola internal, dan kapabilitas penyeimbang otomasi algoritmik dengan diskresi etis aparatur ²⁷. Sinergi kolaborasi lintas disiplin dan manajemen risiko pembuktian *end-to-end* mengawal tindakan birokrasi tetap mencerminkan tujuan organisasi serta hak asasi manusia ²⁸. Sinkronisasi klausul normatif lewat transparansi ketat perilaku algoritma ini mengikat narasi hukum publik pada akurasi fakta murni ²⁹.

Dengan demikian, reformasi hukum administrasi negara berbasis paradigma *TheoLegis* mengembalikan keabsahan tindakan pemerintahan pada jalur akuntabilitas moral sejati melampaui belenggu regulasi kedinasan. Ketika kebenaran material keteraturan alam dihadapkan pada kekakuan birokrasi, formalitas wajib tunduk pada keadilan substantif sengketa. Sebab, menundukkan kemurnian fakta material di bawah superioritas regulasi formal kedinasan pada hakikatnya adalah tindakan tirani prosedural nista yang tidak hanya menodai marwah keadilan di bumi, melainkan secara mutlak meruntuhkan kesucian hukum di hadapan takhta Tuhan.

Tabel 3. Matriks Transformasi Prosedur Administrasi Berbasis Paradigma *TheoLegis* dan Tafsir Surah Al-Buruj

Aspek Transformasi Hukum	Tafsir Al-Jawahir (Syaikh Tantawi Jawhari)	Teks Arab Asli (Inferred)	Penerapan dalam Dekonstruksi Prosedur Administrasi	Prinsip Keteguhan Imaterial (<i>Ashabul Ukhduh</i>)
Dekonstruksi Rigiditas Prosedural melalui Legal Shifts	Menegaskan bahwa nilai keadilan imaterial adalah standar tertinggi yang harus menjiwai penilaian alat bukti, melampaui keabsahan formal di atas kertas.	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ	Mengubah prosedur penilaian administratif menjadi ruang evaluasi adaptif yang membongkar regulasi formal pembelenggu keadilan materiil.	Integritas kebenaran harus dipertahankan di hadapan kekakuan formalisme hukum penguasa yang tiran.

²⁵ Bex and Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof."

²⁶ Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (الجواهر في تفسير القرآن الكريم).

²⁷ Natalia A S Przelomska et al., "Morphometrics and Phylogenomics of Coca (*Erythroxylum Spp.*) Illuminate Its Reticulate Evolution, With Implications for Taxonomy," *Molecular Biology and Evolution*, 2023, <https://doi.org/10.1093/molbev/msae114>.

²⁸ Temidayo Olorunsogo, Boma Sonimiteim Jacks, and Olakunle Abayomi Ajala, "LEVERAGING QUANTUM COMPUTING FOR INCLUSIVE AND RESPONSIBLE AI DEVELOPMENT: A CONCEPTUAL AND REVIEW FRAMEWORK," *Computer Science & IT Research Journal* 5, no. 3 (2024): 671-80, <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.927>.

²⁹ Sajid Ali et al., "Explainable Artificial Intelligence (XAI): What We Know and What Is Left to Attain Trustworthy Artificial Intelligence," *Information Fusion* 99 (2023): 101805, <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805>; Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative."

Aspek Transformasi Hukum	Tafsir Al-Jawahir (Syaiikh Tantawi Jawhari)	Teks Arab Asli (Inferred)	Penerapan dalam Dekonstruksi Prosedur Administrasi	Prinsip Keteguhan Imaterial (Ashabul Ukhdud)
Rekonstruksi Tanggung Jawab Administratif Pejabat	Memandang keteguhan Ashabul Ukhdud sebagai inspirasi bagi pejabat untuk memiliki otonomi etik dalam mengakui kebenaran fakta murni.	وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (QS. Al-Buruj: 8)	Pejabat wajib melakukan koreksi mandiri (legal shifts) ketika kualifikasi awal terbukti keliru di persidangan melalui model hibrida.	Kejujuran fakta imaterial wajib dipertahankan meski bertentangan dengan keputusan sepihak otoritas.
Pemurnian Alat Bukti Berbasis <i>TheoLegis</i>	Menghubungkan hukum makro-kosmos dengan perlindungan hak manusia, memastikan dokumen kedinasan sesuai dengan realitas sosiologis.	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (QS. Al-Buruj: 1)	Menghapus praktik eksklusif bukti prosedural (legal tunnel vision) dengan mengutamakan narasi besar konstitusional dan keadilan transendental.	Menolak kualifikasi hukum sepihak yang dipaksakan oleh kekuasaan yang mengabaikan dimensi spiritual kemanusiaan.

Sumber: Hasil olahan penulis (2026) berdasarkan sintesis pemikiran Jauhari (1926), von Arnould (2017), dan Bex & Verheij (2010)

a. Kodifikasi Kerangka *TheoLegis* Berbasis Keadilan Transendental dalam Pemurnian Alat Bukti Peradilan Tata Usaha Negara Nasional

Kodifikasi kerangka *TheoLegis* berbasis keadilan transendental ke dalam hukum acara peradilan tata usaha negara nasional bertindak sebagai instrumen korektif atas rigiditas formalisme hukum positif yang kerap mengabaikan nilai kemanusiaan³⁰. Dimensi spiritual Surah Al-Buruj memberikan arah baru bagi perluasan konsep narasi besar konstitusional, menetapkan keadilan imaterial sebagai standar tertinggi penafsiran kebenaran material oleh hakim demi mendekonstruksi dominasi bukti formal yang menutup ketimpangan relasi kuasa³¹. Melalui adopsi model peroratif, hakim menyajikan berbagai argumen kontradiktif secara transparan, yang diintegrasikan dengan tata kelola data digital akuntabel melalui sistem *white-box* serta audit rutin rekam jejak digital bukti administrasi guna memitigasi risiko manipulasi fakta³². Pengelolaan bukti digital ini memastikan keselarasan operasionalisasi hukum dengan etika, inklusivitas, dan model pembuktian hibrida kontemporer³³.

Keadilan transendental dalam *TheoLegis* mewajibkan pengujian mendalam terhadap validitas narasi alat bukti guna mendeteksi penyelundupan kualifikasi hukum sepihak oleh pejabat publik. Pelembagaan *legal shifts* memastikan kualifikasi hukum selalu bergeser mengikuti penemuan bukti baru yang sah, mengeliminasi

³⁰ Geal Aditya Christian et al., "Dinamika Dan Problematika Sistem Pembuktian Dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara," *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 2258–63, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3759>.

³¹ Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (الجواهر في تفسير القرآن الكريم); Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative."

³² Adebayo Olusegun Aderibigbe et al., "ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEVELOPING COUNTRIES: BRIDGING THE GAP BETWEEN POTENTIAL AND IMPLEMENTATION," *Computer Science & IT Research Journal* 4, no. 3 (2023): 185–99, <https://doi.org/10.51594/csitrj.v4i3.629>.

³³ Bex and Verheij, "Legal Stories and the Process of Proof."

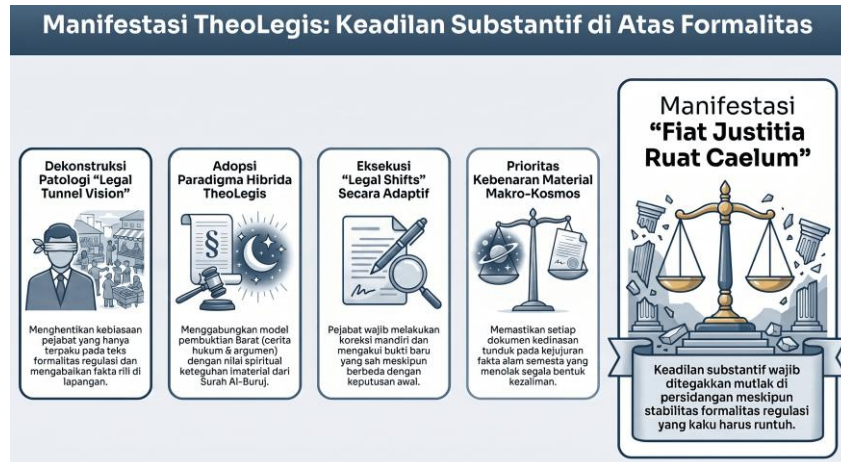
eksklusi bukti, serta menghadirkan perlindungan administratif yang murni dan berintegritas. Ketika kebenaran material yang bersandar pada hukum keteraturan semesta berbenturan dengan kedegilan formalisme birokrasi, pengadilan tata usaha negara wajib bertindak sebagai institusi suci yang memurnikan alat bukti melampaui lembaran kertas regulasi formal penguasa. Sebab, menutup mata dari kejujuran fakta material demi mempertahankan keabsahan formal dokumen kedinasan pada hakikatnya adalah kezaliman prosedural nista yang secara mutlak meruntuhkan kesucian hukum dan menghancurkan marwah keadilan transendental.

b. Manifestasi *Fiat Justitia Ruat Caelum* dalam Rekonstruksi Tanggung Jawab Administratif Pejabat Tata Usaha Negara melalui Paradigma *TheoLegis*

Manifestasi adagium *fiat justitia ruat caelum* dalam rekonstruksi tanggung jawab administratif pejabat tata usaha negara nasional menuntut penegakan keadilan substantif secara mutlak tanpa kompromi formalitas prosedural, guna melampaui sekat kepatuhan mekanis terhadap perintah jabatan semata. Melalui penjangkaran *TheoLegis*, aparatur pemerintah memikul beban transendental untuk berani melakukan pergeseran perspektif yuridis (*legal shifts*) saat pembuktian hibrida mendeteksi kekeliruan fakta, sebuah pilihan etis yang memperoleh legitimasi teologis dari keteguhan imaterial *Ashabul Ukhdud* dalam Surah Al-Buruj³⁴. Integrasi paradigma naratif-argumentatif ini memandu pejabat dan hakim untuk menggunakan logika koherensi cerita demi meruntuhkan sekat pembatasan fakta sepihak (*legal tunnel vision*) yang kerap mengorbankan hak defensif masyarakat demi menyelamatkan muka otoritas publik³⁵. Rekonstruksi berbasis moralitas transendental tersebut mentransformasikan nilai makro-kosmos manuskrip klasik menjadi perkakas etika profesi modern yang memaksa birokrasi melakukan koreksi mandiri dan menyelaraskan regulasi teknis dengan kebenaran materiil di hadapan hukum dan Tuhan. Penemuan kebenaran sejati di ruang sidang tidak boleh lagi tersandera oleh kepatuhan buta pada dokumen kedinasan yang manipulatif, karena menegakkan keadilan meskipun langit runtuh adalah esensi tertinggi hukum acara yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sebab, membiarkan kesewenang-wenangan birokrasi berlindung di balik tameng legalitas formal pada hakikatnya adalah kebiadaban prosedural yang tidak hanya menodai marwah peradilan di bumi, melainkan secara mutlak menantang kedaulatan transendental hukum Tuhan. Sebagai visualisasi komprehensif dari seluruh alur rute peta transformasi akuntabilitas publik berbasis sistem paradigma transendental *TheoLegis* yang secara berani mengonvergensi kedalaman nilai teologis spiritual Surah Al-Buruj dan aspek kelenturan prosedur pembuktian hibrida kontemporer ini, Gambar 3 berikut sengaja disajikan guna memberikan gambaran skematis serta integratif mengenai rekonstruksi mendasar atas tata kelola mekanisme perlindungan hukum warga negara demi mendekonstruksi patologi *legal tunnel vision* secara akuntabel, murni, jujur, transparan, serta berintegritas tinggi:

³⁴ Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (الجواهر في تفسير القرآن الكريم).

³⁵ Von Arnould, "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative."



Gambar 3. Alur Manifestasi *Fiat Justitia Ruat Caelum* melalui Paradigma *TheoLegis*
Sumber : dokumen personal

D. PENUTUP

Anatomi *legal tunnel vision* birokrasi di Indonesia dapat didekonstruksi secara radikal melalui formalisasi konsep *legal shifts* dalam hukum acara peradilan tata usaha negara nasional, di mana implementasi model pembuktian hibrida penyeimbang cerita hukum (*legal stories*) warga negara dan argumen penguasa terbukti melenturkan penilaian hakim sekaligus meruntuhkan dominasi absolut asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*). Sementara itu, formulasi kerangka kerja *TheoLegis* berbasis meta-narasi transendental Surah Al-Buruj berhasil mengejawantahkan adagium *fiat justitia ruat caelum* dengan mendudukkan integritas moral imaterial sebagai fondasi utama rekonstruksi tanggung jawab pejabat publik melalui mekanisme koreksi mandiri di persidangan. Sebagai rekomendasi, kodifikasi kerangka *TheoLegis* ke dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sangat mendesak dilakukan sebagai cetak biru reformasi hukum nasional yang transparan, adaptif, dan akuntabel. Sebab, menegakkan kebenaran material melampaui sekat regulasi formal pada hakikatnya adalah perintah transendental mutlak untuk membebaskan institusi peradilan dari belenggu tirani prosedural sekaligus menjaga kesucian marwah keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Aderibigbe, Adebayo Olusegun, Peter Efosa Ohenhen, Nwabueze Kelvin Nwaobia, Joachim Osheyor Gidiagba, and Emmanuel Chigozie Ani. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEVELOPING COUNTRIES: BRIDGING THE GAP BETWEEN POTENTIAL AND IMPLEMENTATION." *Computer Science \& IT Research Journal* 4, no. 3 (2023): 185–99. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v4i3.629>
- Ali, Sajid, Tamer Abuhmed, Shaker El-Sappagh, Khan Muhammad, José M Alonso, Roberto Confalonieri, Riccardo Guidotti, Javier Del Ser, Natalia Díaz-Rodríguez, and Francisco Herrera. "Explainable Artificial Intelligence (XAI): What We Know and What Is Left to Attain Trustworthy Artificial Intelligence." *Information Fusion* 99

- (2023): 101805. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805>
- Aniq, Ahmad Fathan, Yos Johan Utama, and Nabitatus Sa'adah. "Penguatan Perlindungan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Rekonstruksi Banding Administrasi." *Integralistik* 37, no. 1 (2026): 117–29. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.35371>
- Ardiansyah, Aldi, Muhammad Gary Gagarin Akbar, and Muhamad Abas. "Evidentiary Strength of Land Ownership Certificates: An Analysis of Judicial Considerations in Supreme Court Decision Number 3762 K/Pdt/2022." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 471–87. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.463>
- Arnould, Andreas Von. "Special Issue-Law's Pluralities Norms and Narrative." *German Law Journal* 50 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S2071832200021970>.
- Bex, Floris, and Bart Verheij. "Legal Stories and the Process of Proof." *Artificial Intelligence and Law* 21, no. 3 (2013): 253–78. <https://doi.org/10.1007/s10506-012-9137-4>
- Brès, Luc, Emmanuel Raufflet, and Johnny Boghossian. "Pluralism in Organizations: Learning from Unconventional Forms of Organizations." *International Journal of Management Reviews* 20, no. 2 (2018): 364–86. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12136>
- Christian, Geal Aditya, Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Neysa Natalie Pangaribuan, and Muhammad Imam Ghustomi. "Dinamika Dan Problematika Sistem Pembuktian Dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara." *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 2258–63. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3759>
- Damanik, Fritz Hotman Syahmahita, Ahadi Rerung, Muhammad Dhobit Azhary Lubis, Reza Saputra Panggabean, and Putri Ainun Azizah. "Community Participation in the Public Decision Process: Realizing Better Governance in Public Administration." *Global International Journal of Innovative Research* 1, no. 2 (2023): 88–96. <https://doi.org/10.59613/global.v1i2.12>
- Haque, A K M Bahalul, A K M Najmul Islam, and Patrick Mikalef. "Explainable Artificial Intelligence (XAI) from a User Perspective: A Synthesis of Prior Literature and Problematising Avenues for Future Research." *Technological Forecasting and Social Change* 186 (2022): 122120. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122120>
- Hardi, Irsan, Jumadil Saputra, Rahmilia Hadiyani, Ar Razy Ridha Maulana, and Ghalieb Mutig Idroes. "Decrypting the Relationship Between Corruption and Human Development: Evidence from Indonesia." *Ekonomikalia Journal of Economics* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.60084/eje.v1i1.22>
- Hartati, Tutut, and Edi Saputra Hasibuan. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian Dalam KUHAP Nasional." *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora* 12, no. 1 (2026): 75–85. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4925>
- Husyam, Lies Nur Intan, and Rita Junita. "Rasionalitas Weberian Dalam Pemerintahan Modern: Tantangan Birokrasi Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 4, no. 6 (2026): 4050–62. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1744>.
- Jauhari, Thanthawi. *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* 25. (الجواهر في تفسير القرآن الكريم). 2nd ed. Cairo, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1926
- Longo, Luca, Mario Brčić, Federico Cabitza, Jaesik Choi, Roberto Confalonieri, Javier Del Ser, Riccardo Guidotti, et al. "Explainable Artificial Intelligence (XAI) 2.0: A

- Manifesto of Open Challenges and Interdisciplinary Research Directions." *Information Fusion* 106 (2024): 102301. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102301>
- Mousourakis, George. "Conceptualizing Legal Change: A Comparative Law Approach." *Acta Juridica Hungarica* 48, no. 3 (2007): 259–80. <https://doi.org/10.1556/AJur.47.2007.3.3>
- Nasution, Ismaya Rahailia, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan Atas Doktrin Dan Yurisprudensi." *Politika Progresif Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2597>
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Olorunsogo, Temidayo, Boma Sonimiteim Jacks, and Olakunle Abayomi Ajala. "LEVERAGING QUANTUM COMPUTING FOR INCLUSIVE AND RESPONSIBLE AI DEVELOPMENT: A CONCEPTUAL AND REVIEW FRAMEWORK." *Computer Science & IT Research Journal* 5, no. 3 (2024): 671–80. <https://doi.org/10.51594/csitj.v5i3.927>
- Przelomska, Natalia A S, Rudy Diaz, F A Ávila, Gustavo A Ballen, Rocio Cortés-B., Logan Kistler, Daniel H Chitwood, et al. "Morphometrics and Phylogenomics of Coca (Erythroxylum Spp.) Illuminate Its Reticulate Evolution, With Implications for Taxonomy." *Molecular Biology and Evolution*, 2023. <https://doi.org/10.1093/molbev/msae114>
- Rumbawer, Yudit Bertha, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen. "AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA: ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS." *JURNAL SULTAN Riset Hukum Tata Negara*, 2024, 52–63. https://doi.org/10.35905/sultan_hn.v2i2.9569
- Sidqia, Amalia, and Muhammad Iksan. "PTUN Dan PT TUN: Kompetensi Pengadilan Dan Relevansinya Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3345>
- Sirait, Timbo Mangaranap, Khalimi --, and Ignatius Bambang Sukarno Hatta. "ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN.JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 83–89. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1625>
- Spaltani, Bitu Gadsia. "Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan." *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 55–78. <https://doi.org/10.55292/dt3r3350>
- Stewart, Elaine, and Ciarán Connolly. "The Govern(Mentality) of Financial Reporting Reform: Lessons from UK Central Government." *Public Management Review*, 2024, 1–22. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2387816>
- Viana, Cantika Reika. "KEDUDUKAN DAN PENGARUH ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DI NEGARA INDONESIA." *ADIL Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2026): 317–39. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5734>